

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif ditemukan bahwa terjadi penurunan grade nilai efisiensi belanja daerah, dimana sebelum pemekaran nilai rata-ratanya sebesar 98,40% yang berada pada kriteria kurang efisien kemudian pada periode setelah pemekaran nilai rata-ratanya sebesar 102,91% yang berada pada kriteria tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan belanja daerah pada periode setelah adanya pemekaran.
2. Hasil pengujian hipotesis untuk mencari signifikansi perbedaan antara efisiensi belanja daerah sebelum dan setelah pemekaran ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi belanja daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran pada Kabupaten Gorontalo atau perbedaan pada periode 2002-2007 dengan periode 2008-2015.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengoptimalkan belanja pegawai (*government expenditures*) yang sangat besar tersebut pada kegiatan produktif dan mendorong kegiatan ekonomi. Bagi daerah belanja pemerintah selayaknya memanfaatkan potensi daerah, misalnya bimbingan teknis, pelatihan dan lokakarya dilaksanakan didaerah agar perputaran uang ada didaerah. Sehingga alokasi belanja daerah pada aspek belanja pegawai dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo
2. Adanya peningkatan realisasi belanja daerah sebaiknya disikapi dengan bijak oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo yakni dengan menetapkan tujuan berdasarkan RPJMD daerah sehingga pembangunan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya sekedar mengejar *track rekor* membangun infrastruktur namun manfaatnya harus sangat dirasakan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2010. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap belanja modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Skripsi* Universitas Negeri Semarang
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ragkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri)*. Jakarta, PT. Indeks, 2009.
- Deddi, Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat
- Fahrianta, Riswan dan Carolina.2012."Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas".*Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.13, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hananto, Danang Purnomo. 2014. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang. *Skripsi* Universitas Gunadarma
- Harinaldi, M.Eng, (2005), *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*,. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia. Indonesia, Bogor
- Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Buku Induk Kode dan Data Wilayah Provinsi, Kab/Kota Kecamatan* 2013.

<http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/04/29/f/i/file.pdf>.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Lubis, Putri Kemala Dewi dan Nurlia Hafni. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *Jurnal Kitabah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Azas Umum Pengelolaan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Santoso, Dwi Budi. 2011. Analisis Efisiensi Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Barito Utara sebelum dan setelah pemekaran. *Tesis Universitas Brawijaya*.

Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Setiawan, A. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Nuha Medika.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Sumarsono, S. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September ISSN 2303-1174

Sunandar. 2011. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPKBKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal. Jurnal. Dosen Program Studi Akuntansi Poloteknik Harapan Bersama

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah